UNCDF

Unlocking Public and Private Finance for the Poor

Tanggapan Darurat COVID-19

KEUANGAN PEMERINTAH SETEMPAT

Catatan Panduan untuk Tindakan Segera

EDISI #4

SUPLEMEN:

Menu DHPO dan Sistem Tanggapan Cepat Kunci Ganda

15 MEI 2020

Suplemen ini membahas tanggapan segera terhadap COVID-19 yang direkomendasikan bagi pemerintah setempat melalui Dana Hibah untuk Pengeluaran Operasional (DHPO)/Block Grant dan bantuan pemulihan ekonomi UKM. Suplemen ini harus dibaca bersama dengan catatan panduan. Catatan ini bersifat memberi saran dan dapat disesuaikan dengan tiap keadaan.

Suplemen ini mencakup menu opsi umum untuk bantuan ini yang dapat disetujui dengan pelaporan konsolidasi melalui Sistem Tanggapan Cepat Kunci Ganda UNCDF. Menunya diselaraskan dengan klasifikasi tahap pandemi dari Organisasi Kesehatan Dunia, yang membedakan antara tahap kesiapan dan pengendalian awal dengan tahap penularan aktif di masyarakat. Menunya mencakup:

- Tindakan untuk tahap kesiapan
- Tindakan untuk tahap darurat
- Tindakan untuk tahap pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali ruang fiskal

Tanggapan ini tidak selalu berurutan dan dapat dilaksanakan secara bersamaan. Tetapi, penting untuk mengelompokkan sesuai dengan tahapan di atas agar semua tindakan dapat diperiksa relevansinya dengan COVID-19 dan untuk mengonsolidasikan pelaporan kepada para penyandang dana untuk tindakan tertentu yang dilakukan oleh berbagai kota dan pemerintah setempat.

Pada waktu tulisan ini disusun, menu ini digunakan untuk melaporkan DHPO dan bantuan pemulihan UKM di beberapa negara.

Isi suplemen ini disusun oleh Mohammad Abbadi dan David Jackson dengan masukan dari tim Pembiayaan Pembangunan Daerah UNCDF. Lihat https://www.uncdf.org/local-development-finance; hubungi nan.zhang@uncdf.org untuk informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan DHPO dan bantuan UKM melalui keuangan pemerintah setempat.

Ikhtisar: pemerintah setempat sebagai garda depan tanggapan COVID-19

COVID-19 menunjukkan pentingnya tindakan daerah yang cepat dan efektif untuk memperlambat penyebaran virus ini. Salah satu prakata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat Ini adalah, "Tes, tes, tes", yaitu melakukan tes bahkan pada orang-orang tanpa gejala memungkinkan isolasi orang-orang yang tertular, mengetahui orang-orang yang memiliki antibodi, dan merawat pasien dengan sakit parah. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pengetesan awal di tingkat "industri", penjarakan sosial, dan perawatan terfokus dapat menghentikan virus secara efektif. Di sebagian besar negara, efektivitas tanggapan COVID-19 sangat beragam di berbagai wilayah negara. Ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam penyebaran virus secara geografis, tetapi juga perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh pemerintah setempat sebagai pemberi tanggapan pertama.

Memang, beberapa negara mengabaikan peran pemerintah setempat dalam tanggapan awal dan kemudian mengakui secara terbuka betapa mahalnya pengabaian ini. Contohnya, di United Kingdom, Jeremy Hunt, mantan menteri kesehatan dan ketua komite kesehatan di parlemen saat ini, menginformasikan kepada masyarakat bahwa "Salah satu alasan terlalu lamanya kenaikan jumlah pengetesan adalah pengetesan dilakukan terpusat... Menurut saya, salah satu pelajaran yang dapat kami ambil secara logis dari kelambatan mendorong banyak hal secara terpusat adalah seharusnya kami percaya kepada pemerintah setempat untuk membantu kami dalam hal ini" (Wawancara dengan BBC, *World at One*, 17 April, https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000h93y).

Edisi keempat catatan panduan ini mencakup data baru dan bagian dengan isi lebih luas tentang Dana Hibah untuk Belanja Operasional yang dapat menjadi cara terukur dan efektif bagi pemerintah setempat untuk mempercepat tanggapan COVID-19 dengan tepat waktu dan sesuai dengan tahap epidemi di daerah setempat. Informasi baru ini terdapat dalam bagian Langkah Segera yang Harus Dilakukan, mulai dari halaman 7.

Gambar 1 mengilustrasikan perbedaan dalam kurva kenaikan pandemi hingga saat ini di berbagai negara. Jelas bahwa meskipun kurva telah memuncak di Asia Timur, Eropa, dan Amerika Utara, penyebarannya masih bertambah cepat di tempat lain, misalnya di Bangladesh dan Peru. Gambar 2 menunjukkan perbedaan dalam kurva COVID-19 di berbagai wilayah dan kota di berbagai negara; terlihat kekontrasan antara berbagai wilayah geografis dalam satu negara.

Meskipun gambar 2 mencampuradukkan pemerintah setempat dan pemerintah daerah, jelas bahwa beberapa daerah memperlambat laju kenaikan tersebut. Contohnya, di Amerika Serikat, New York sudah berhenti kenaikannya, tetapi negara bagian tetangganya, New Jersey, belum. Di Korea Selatan, kota Daegu berhasil mengendalikan virus sejak awal. Data dan analisis mengungkapkan bahwa penularan puncak terjadi pada waktu yang berbeda-beda di berbagai kota dan wilayah sesuai dengan laju penyebaran dan waktu dimulainya penularan – fenomena yang kini dikenal sebagai "puncak bergulir". Perlu diketahui bahwa gambar-gambar ini menggunakan skala log dan, oleh karena itu, melambangkan angka-angka yang mengerikan. Angka-angka ini dinamis dan diperbarui tiap hari. Informasi terkini dapat dilihat di sini: https://www.ft.com/coronavirus-latest.

Pemerintah setempat memimpin tanggapan COVID-19 di seluruh dunia. Mereka berada di lini depan keterlibatan masyarakat, pemberian layanan, dan pengelolaan ruang publik. Kajian, testimoni, dan tanggapan pemerintah dari seluruh dunia telah menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah setempat, kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia, akses ke dana darurat, dan alur koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat adalah beberapa langkah utama untuk mengendalikan penyebaran virus ini dan memastikan pemulihan yang cepat. Pemerintah setempat mana pun di seluruh dunia bertanggung jawab atas penyediaan layanan penting kepada penduduknya. Pemerintah setempat juga prihatin bahwa serempak dengan implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian virus, mereka juga harus tetap mempertahankan tingkah pelayanan yang mencukupi. Menjaga tingkat penyediaan layanan yang memadai dan memastikan kepatuhan pada langkah-langkah pembatasan menjadi perhatian utama pemerintah setempat. Oleh karena itu, pemerintah setempat merupakan kunci untuk memastikan protokol tanggapan COVID-19 dilaksanakan.

Contoh terkini di China dan Korea Selatan menunjukkan signifikansi dan efektivitas pemerintah setempat dalam menggerakkan tanggapan masyarakat. Salah satu tindakan paling nyata yang dilakukan oleh pemerintah selama wabah COVID-19 adalah melaksanakan keputusan segera dengan tepat waktu, diarahkan ke tempat dan lembaga yang tepat demi tanggapan yang efektif. Singkatnya, fokus diberikan pada peningkatan dukungan dan kecepatan transfer hibah fiskal kepada pemerintah setempat dalam upaya mereka untuk menangani virus corona. Meskipun seluruh tanggapan di Provinsi Wuhan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, pelaksanaan sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dan setempat. Cina menerbitkan kuota di muka sebesar $8,6 miliar dollar AS dalam pembayaran transfer kepada pemerintah setempat pada tahun 2020. Tambahan $16 miliar dollar AS juga dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah setempat untuk mengatasi tantangan fiskal mereka mulai dari Desember 2019 sampai Maret 2020. Gambar 2 menunjukkan kesuksesan relatif Daegu dalam mengelola krisis.

GAMBAR 1 **Alur kematian menurut negara**

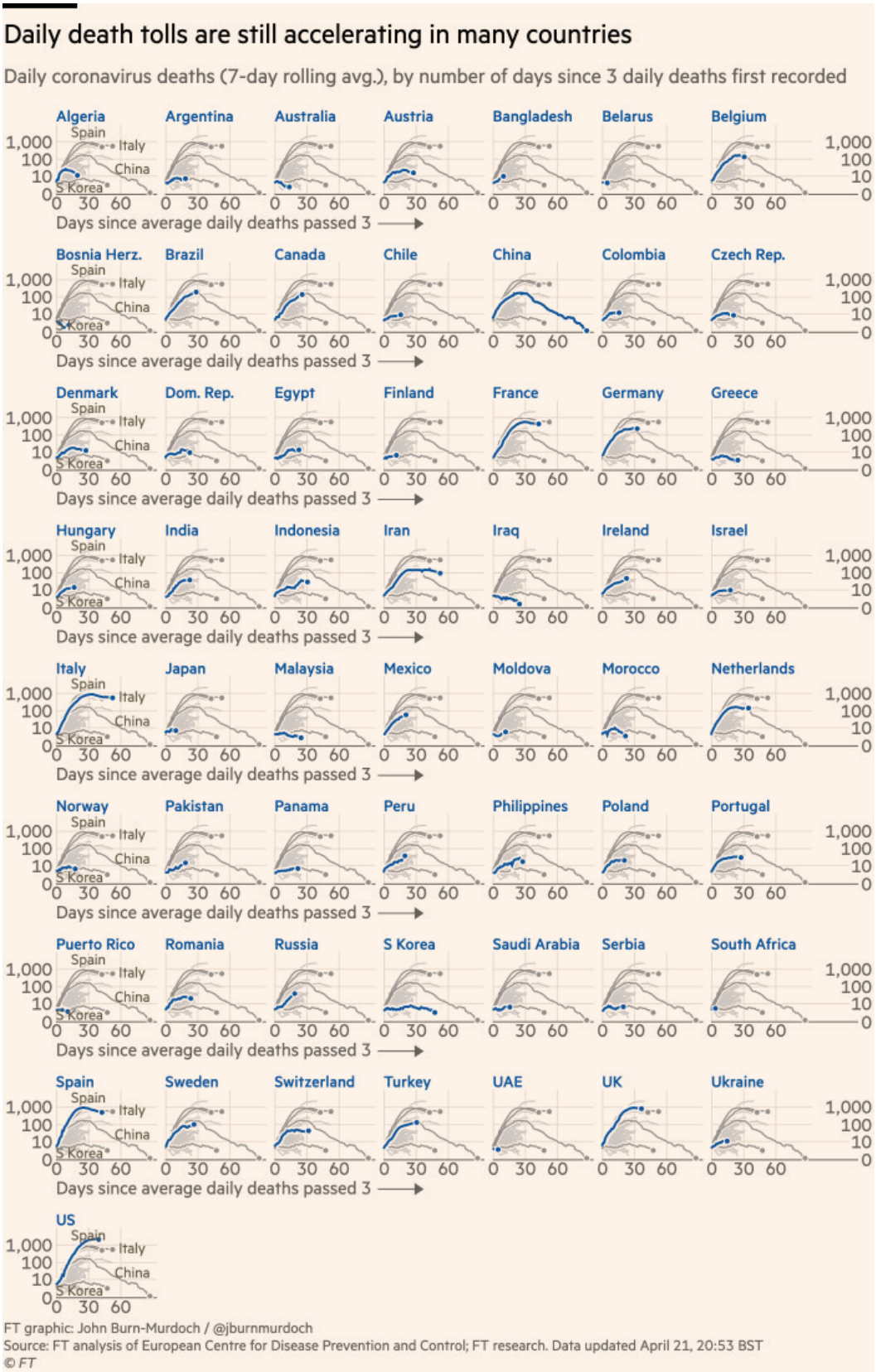

Sumber: https://www.ft.com/coronavirus-latest.

GAMBAR 2 **Alur kematian menurut wilayah**

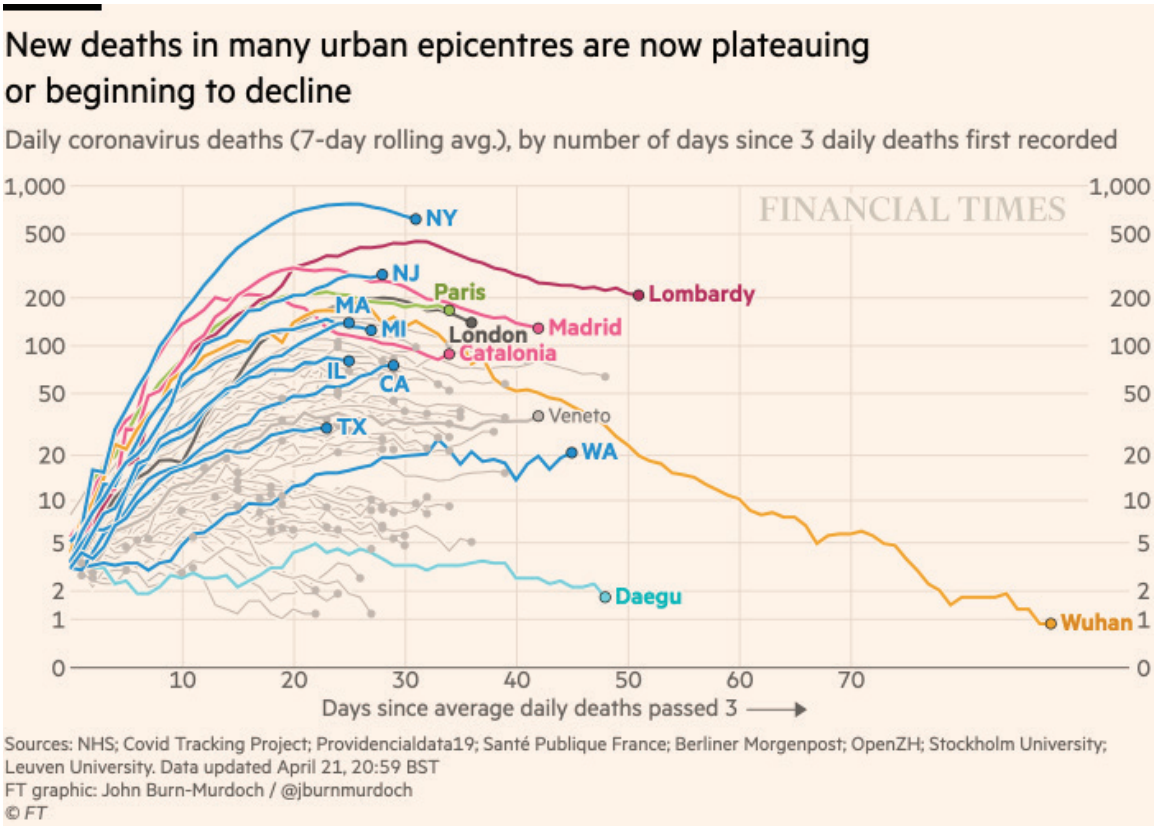

Sumber: https://www.ft.com/coronavirus-latest.

Kepemimpinan pemerintah setempat dalam melawan tantangan COVID-19 – serta epidemi sebelumnya, seperti flu burung, SARS, dan Ebola – sangat tepat bukan hanya karena dampak epidemi dilokalisasi (hal ini tepat dalam situasi krisis lain) tetapi juga karena khususnya untuk COVID-19, tindakan setempat seperti penjarakan sosial berdampak langsung pada hasilnya. Pemerintah setempat diposisikan khusus untuk membentuk, menyesuaikan, dan memberikan tanggapan menyeluruh terhadap epidemi. Karena epidemi menimbulkan dampak sosial ekonomi multiaspek yang mengancam tatanan sosial, tata kelola dan ekonomi, diperlukan tanggapan kohesif lintas batas sektor untuk memastikan keselarasan dan sinergi antara berbagai intervensi sektor dalam wilayah tertentu.

Pemerintah setempat diposisikan khusus untuk membentuk, menyesuaikan, dan memberikan tanggapan menyeluruh terhadap epidemi.

Tanggapan segera keuangan pemerintah setempat

MEMBIAYAI PEMERINTAH SETEMPAT

Tiap langkah pencegahan dan pengendalian membutuhkan sumber daya dan memiliki aspek fiskal. Untuk membiayai tanggapan epidemi mereka, pemerintah setempat mengandalkan tiga sumber utama: pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah tingkat lain, dan pinjaman daerah. Transfer dari pemerintah tingkat lain hanya tersedia di negara-negara dengan lingkungan legislatif dan kebijakan yang mendukung.

Pendapatan asli daerah adalah sumber pembiayaan paling fleksibel yang tujuannya dapat diubah dengan relatif mudah untuk tanggapan epidemi. Tetapi di banyak negara, terutama negara berkembang, rasio pendapatan asli daerah hanya di bawah 10 persen dari anggaran total pemerintah setempat dan tidak memadai untuk tanggapan epidemi yang efektif. Selain itu, tanggapan kesehatan masyarakat terhadap virus corona menggerus pendapatan asli daerah secara signifikan dalam tiga cara:

- Penjarakan sosial, bekerja dari rumah, dan karantina wilayah/penutupan akses menghancurkan industri ritel dan transportasi serta menghabiskan penerimaan pajak pemerintah setempat.
- Peningkatan pengangguran mengurangi pembayaran pajak sewa dan properti.
- Secara keseluruhan, merosotnya kegiatan ekonomi mengurangi penerimaan dari pajak dan biaya usaha.

Transfer dari pemerintah tingkat lain tetap menjadi sumber utama bagi keuangan pemerintah setempat di banyak negara. Tetapi, 70-80 persen dari transfer pemerintah pusat merupakan hibah nondiskresioner untuk kegiatan sektor tertentu dan memberikan fleksibilitas sangat terbatas bagi pemerintah setempat untuk menyesuaikan sumber-sumber ini dengan kebutuhan tanggapan epidemi setempat. Selain itu, hibah nonmodal berulang biasanya hanya cukup untuk membayar gaji, sedangkan biaya operasi dan pemeliharaan sering terabaikan. Situasi ini merupakan kontradiksi nyata dengan tanggapan epidemi efektif yang membutuhkan (i) pendekatan di seluruh sektor, yang berarti realokasi dana antara berbagai sektor; dan (ii) penambahan belanja nonmodal untuk kesadaran dan mobilisasi masyarakat, penegakan ketertiban umum, dan restrukturisasi penyediaan layanan umum untuk memastikan keberlanjutannya. Di banyak negara, kerangka hukum mendukung manajemen risiko bencana setempat. Tetapi, hal ini sering tidak diberi perhatian fiskal yang memadai – dan kalau pun ada, butuh prosedur rumit untuk mengeluarkan dana tiap kali dibutuhkan, alih-alih memberikan tanggapan likuiditas yang segera dengan prosedur yang ditentukan sebelumnya.

Terakhir, **pinjaman daerah**, terutama di negara berkembang, dibatasi oleh sempitnya ruang fiskal pemerintah setempat dan rendahnya kemampuan pelunasan mereka serta keterbatasan daya pinjam mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meminjam dana

yang besar untuk investasi modal tampak tidak mungkin. Jika memungkinkan secara hukum, pemerintah setempat dapat melakukan pinjaman jangka pendek untuk kegiatan operasional mendesak jika sumber-sumber keuangan lain tidak ada.

LANGKAH SEGERA YANG HARUS DILAKUKAN

Pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan. Ruang fiskal pemerintah setempat akan terdampak serius oleh krisis ini. Ini akan mengurangi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang merupakan bagian penting untuk mendukung upaya nasional. Tindakan-tindakan berikut ini disarankan dengan segera:

1. **Mempertimbangkan persediaan sumber daya yang ada dan revisi anggaran untuk kuartal/tiga bulan berikutnya.** Unsur paling mungkin adalah mengalihkan sumber-sumber untuk belanja modal ke belanja operasional; ini tidak menambah sumber tetapi mendistribusikan ulang sumber yang ada. Ini adalah tindakan dalam kendali pemerintah setempat yang hanya membutuhkan arahan kebijakan dari pemerintah pusat tentang jenis-jenis sumber yang sudah dianggarkan dan dapat didistribusikan ulang. Panduan tersebut diperlukan karena beberapa pemerintah setempat bisa menjadi terlalu berhati-hati dan menunggu datangnya transfer, sedangkan pemerintah setempat lain bisa bereaksi berlebihan dan mendistribusikan sumber yang ditetapkan untuk pembayaran penting, seperti gaji, untuk membeli alat pembersih/sanitasi.
2. **Lembaga pemerintah pusat dan pihak lain harus melakukan pembayaran kepada pemerintah setempat untuk penggunaan harta modal pemerintah setempat (gedung, dll.)** sebagai bagian dari tanggapan. Ya, ini krisis tetapi pembayaran untuk penggunaan harta ini akan mengembalikan pendapatan asli daerah yang hilang, menjaga likuiditas untuk fungsi-fungsi penting, dan mendukung upaya tanggapan.
3. **Lembaga dan perusahaan terkait yang mampu harus membebaskan utang pemerintah setempat dan pembayaran lain untuk sementara.** Pemerintah pusat harus memberikan jaminan/kompensasi kepada perusahaan yang membebaskan pembayaran tersebut. Pembayaran harus dijadwalkan ulang dengan penanggung jawab keuangan (CFO).
4. **Evaluasi sistem pembayaran pajak dan biaya setempat untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dan akses.** Evaluasi cara pembayaran pajak dan biaya setempat oleh masyarakat dan perusahaan untuk mengidentifikasi cara untuk segera mengurangi kontak langsung jika relevan; sekaligus sebisa mungkin menjaga akses dan cakupan, dan menghindari "pengecualian digital" atau hilangnya kendali sistem pembayaran. Ini bisa termasuk memaksimalkan pendapatan dari perusahaan yang dapat terus mengoperasikan platform digital untuk mempertahankan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai tindakan segera, penting untuk menghindari pengeluaran tambahan yang berlebihan, pengadaan jangka panjang, atau berkomitmen pada kontrak penyedia layanan jangka panjang.

Transfer dari pemerintah tingkat lain. Transfer tersebut dapat menjadi kendaraan yang efektif bagi pemerintah untuk melaksanakan strategi tanggapan COVID-19 mereka. Di banyak negara, setidaknya terdapat empat saluran yang sudah ada yang bisa digunakan:

- **Hibah dan transfer diskresioner untuk belanja berulang kepada pemerintah setempat biasanya digunakan untuk gaji, biaya perjalanan, barang dan jasa.** Manfaat saluran ini adalah saluran ini tersedia di seluruh departemen pemerintah setempat atas kebijaksanaan pemimpin setempat. Ini dapat ditingkatkan dan ditetapkan ulang sebagai hibah tanggap operasional COVID-19 untuk melaksanakan protokol setempat. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran yang ada dengan pengawasan oleh otoritas kesehatan terkait. Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme yang ada dengan peningkatan pendelegasian wewenang atau pagu untuk pengadaan setempat jika relevan. Penambahan nilai transfer ini akan memungkinkan pembiayaan bersama dengan kategori berikutnya di bawah ini untuk efektivitas tambahan.
- **Hibah bersyarat kepada dinas pendidikan dan kesehatan setempat oleh kementerian pusat.** Ini jelas harus menjadi kendaraan utama untuk tanggapan tersebut – bukan hanya untuk sumber fiskal nasional tetapi juga untuk sumber tambahan yang diterima sebagai bagian dari upaya bantuan internasional. Jika memungkinkan, mitra pembangunan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ini, membangun pengetahuan dan kemampuan operasional lokal mereka, dan menghindari sistem paralel.
- **Hibah modal diskresioner kepada pemerintah setempat.** Dana ini membuat cakupan tanggapan segera makin berkurang dalam beberapa bulan berikutnya karena dana ini tergantung pada siklus konstruksi dan pengadaan. Tetapi, keadaan darurat ini memberi mereka contoh untuk diterapkan ulang pada pembelian alat medis, kendaraan, dan pos belanja modal lain di dalam bagan akun dan klasifikasi belanja pemerintah untuk belanja modal. Pengadaan dapat dipersingkat. Penting bagi pemerintah setempat untuk memperoleh penggantian di kemudian hari untuk tanggapan segera ini, untuk menghindari gangguan pada proyek besar yang sedang berjalan. Satu keuntungan dari tindakan ini adalah banyak proyek besar yang akan berhenti karena penjarakan sosial dan langkah-langkah lain; oleh karena itu; likuiditas mungkin ada.
- **Mengalihkan dana pengelolaan risiko bencana untuk mendukung tanggapan COVID-19.** Beberapa negara memiliki ketentuan tentang dana tanggapan risiko bencana dan di banyak negara, ketentuan ini belum pernah dilaksanakan atau diterapkan secara penuh dari pusat. Dana ini dapat dimanfaatkan ulang dan ditransfer segera kepada pemerintah daerah untuk mendukung rencana tanggapan mereka.

Dana Hibah untuk Belanja Operasional (DHBO). DHBO adalah jenis transfer fiskal khusus dari pemerintah tingkat lain yang dapat menjadi kendaraan yang berguna dan efektif bagi pemerintah untuk melaksanakan strategi tanggapan COVID-19 mereka. Keindahannya adalah DHBO menggabungkan unsur paling efektif dari hibah modal diskresioner dan hibah diskresioner berulang. Mekanisme transfer DHBO sama dengan mekanisme transfer hibah modal. Sumbernya tidak diambil dari anggaran berulang untuk sumber daya manusia dan belanja operasional dasar;

alih-alih, sumbernya diambil dari dana lain dan menggunakan modal tersebut untuk pembangunan (atau anggaran modal) sebagaimana relevan. Metode ini memiliki empat keuntungan:

- Tergantung pada tingkatan karantina wilayah/penutupan akses dan dampak ekonominya, belanja untuk banyak proyek pembangunan atau proyek besar akan melambat, artinya mungkin akan ada likuiditas cepat dalam lini anggaran tersebut.
- Belanja dalam anggaran pembangunan/modal biasanya dievaluasi tiap tahun dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang (misalnya pada sumber daya manusia).
- Anggaran pembangunan biasanya lebih terbuka untuk menerima kontribusi dari bantuan pembangunan internasional, bantuan filantropis, dan sumber pemerintah dan yang lainnya. Rekening pembangunan yang ada dengan pelaporan transparan dapat ditetapkan ulang.
- Anggaran pembangunan dapat diserahkan pada diskresi walikota atau badan berwenang pada otoritas lokal, dan tidak perlu dialokasikan sebelumnya ke departemen atau sektor tertentu.

Setelah tersedia untuk pemerintah setempat, DHBO dapat langsung dipakai untuk melaksanakan protokol tanggapan COVID-19. Dalam hal ini, DHBO berbeda dengan anggaran pembangunan atau modal rutin. DHBO memiliki kriteria dan aturan khusus. Contohnya, DHBO tidak dapat digunakan untuk belanja yang menimbulkan kewajiban jangka panjang seperti pegawai permanen baru atau infrastruktur besar baru yang membutuhkan pengoperasian dan pemeliharaan. Tetapi, DHBO dapat digunakan untuk biaya pegawai (sementara), barang dan jasa, dan barang modal skala kecil (misalnya alat medis atau sepeda motor). Oleh karena itu, DHBO mencakup seluruh rentang mata anggaran dan kode belanja, yang memungkinkan fleksibilitas penting yang dapat:

- **Menambah dan ikut membiayai intervensi** oleh departemen-departemen yang menggunakan dana bersyarat yang dialokasikan terpusat (misalnya untuk membuat inisiatif yang sedang dijalankan oleh rumah sakit lokal yang didanai dari kementerian kesehatan menjadi lebih efektif).
- **Menggabungkan intervensi** oleh berbagai departemen (misalnya melengkapi inisiatif yang sedang dijalankan oleh rumah sakit lokal dengan kegiatan tindak lanjut oleh departemen sosial atau pekerjaan umum, seperti menyetel ulang fasilitas untuk mendorong penjarakan sosial).
- **Mendistribusikan dana ke semua kategori belanja yang sah** (misalnya mempekerjakan pegawai atau konsultan (sementara), membeli bahan bakar atau alat pelindung diri, atau membeli sepeda motor untuk tim pelaksana karantina).
- **Dikelola oleh departemen masing-masing atau unit tanggap COVID-19 khusus** di bawah walikota atau dewan, atau gabungan keduanya.

Kinerja dan pelaporan DHBO COVID-19 dicirikan oleh transparansi dan frekuensi pelaporan. Di sini fitur-fitur pelaporan yang ada untuk anggaran pembangunan dapat diadaptasi. Cara terbaik mengelola DHBO adalah dengan rencana yang dibuat pemerintah setempat, yang biasanya disesuaikan menurut perkembangan epidemi di daerah tersebut. Rencana dapat didukung oleh

lembaga penanggung jawab tanggap COVID-19 untuk relevansinya. Transfer DHBO dapat dibuat lebih sering daripada untuk transfer pembangunan rutin, misalnya tiap tiga bulan berdasarkan capaian langkah atau target kinerja dalam rencana. Di sini, ada dua karakteristik penting. Pertama, pemerintah setempat bertanggung jawab atas penyusunan, pengelolaan, dan pelaksanaan rencana; kedua, langkah kinerja cukup luas agar memungkinkan revisi anggaran (tanpa biaya) dengan cepat dan sering serta perubahan dalam pendistribusian belanja antara kegiatan; ketiga, sistem DHBO memungkinkan pemerintah setempat untuk "mengendalikan kurvanya" dan mengadaptasi tanggapan dan kegiatannya sesuai dengan perkembangan epidemi.

Prioritas harus diberikan pada modalitas pembiayaan yang memungkinkan fleksibilitas maksimum dan syarat minimum untuk melaksanakan tanggapan di seluruh sektor dalam lingkup daerah.

Terakhir, jumlah DHBO yang tepat akan tergantung pada sumber yang tersedia, tahap penyebaran epidemi, tingkat keterlibatan pemerintah setempat sebagai bagian dari tanggap nasional, dan kemampuan penyerapan pemerintah setempat. UNCDF telah membuat alat pelingkupan yang cepat, membuat metodologi pelingkupan yang diterapkan dalam pekerjaannya yang lain pada keuangan pemerintah setempat, yang dapat dengan cepat menghasilkan proposal rencana DHBO dengan bermitra dengan pemerintah pusat atau pemerintah setempat yang tertarik. UNCDF juga dapat menyediakan arsitektur hibah kota elektronik untuk dengan cepat memproses dan melaporkan kontribusi eksternal ke sistem DHBO dari mitra pembangunan internasional.

Pinjaman daerah. Jika perlu, pemerintah setempat harus mengevaluasi dampak COVID-19 terhadap kewajiban mereka. Banyak negara memiliki bank pembangunan nasional dan beberapa negara memiliki bank pembangunan daerah. Bank tersebut dapat memberikan jaminan dan mendukung pinjaman daerah untuk memastikan kelanjutan program dan investasi yang ada. Pemerintah setempat dapat melakukan pinjaman jangka pendek untuk membayar pengeluaran darurat (seperti gaji dan peralatan).

Saluran kredit jangka panjang dan solusi lain akan dibahas dalam catatan berikutnya tentang pemulihan cepat.

Dana filantropis. Banyak pemerintah setempat mampu menggalang dana filantropis tambahan untuk melengkapi sumber-sumber pembiayaan yang dibahas sebelumnya. Dana filantropis dapat diberikan kepada pemerintah setempat secara langsung sebagai sumbangan (yang merupakan jenis dana paling fleksibel) atau sebagai kontribusi keuangan atau nonkeuangan (peralatan dan bahan) untuk fasilitas dan layanan tertentu, seperti bantuan ambulans untuk mengantarkan pasien, bantuan ke tempat penampungan bagi korban kekerasan gender dan seksual dan kategori rentan lain, sembako bagi penduduk rentan selama periode karantina wilayah/penutupan akses, pusat makanan dan titik distribusi, dll. Beberapa pemerintah setempat membentuk dana darurat setempat untuk memobilisasi dana filantropis. Dana tersebut berfungsi sebagai struktur pembatas

dengan pengaturan tata kelola dan prosedur belanja sendiri untuk memastikan kesesuaian dan transparansi pelaksanaan.

Pemerintah setempat dapat meningkatkan efektivitas dalam menggerakkan dana filantropis dengan memanfaatkan platform digital untuk sumbangan urun daya. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan upaya mobilisasi ke kebutuhan spesifik seperti membeli alat tes atau obat dan dampaknya dapat dilacak dengan mudah. Bentuk lain pembiayaan pemerintah dapat dimobilisasi juga melalui urun daya yang memanfaatkan platform digital.

Untuk semua langkah ini, transparansi dan pelaporan khusus lain tentang COVID-19 dapat ditambahkan; tetapi karena tanggapan segera ini dibutuhkan dalam hitungan hari, bukan minggu, dan bahwa langkah-langkah yang ada sudah berjalan dan diatur, kecepatan harus menjadi pertimbangan utama. Prioritas harus diberikan pada modalitas pembiayaan yang memungkinkan fleksibilitas maksimum dan syarat minimum untuk melaksanakan tanggapan di seluruh sektor dalam lingkup daerah.

PENGGERAK PERTAMA, CARA MEMULAI, BANTUAN TEKNIS EFEKTIF, DAN PEMELAJARAN

Pelaksanaan langkah-langkah ini membutuhkan bantuan teknis. UNCDF sudah membantu Pemerintah Bangladesh, Laos, Senegal, Somalia, dan Uganda untuk melaksanakan beberapa langkah yang disebutkan di atas. Dialog serupa sedang berjalan dengan pemerintah setempat dan otoritas pusat di negara-negara lain. Kami ingin berbagi tentang pengalaman ini kepada para mitra kami di United Cities and Local Governments (UCLG), Metropolis, dan UN Habitat di jejaring tanggap COVID-19 Pemerintah Setempat, termasuk sesi belajar langsung pada 23 April 2020.

Untuk perincian lebih lanjut, hubungi nan.zhang@uncdf.org.

Dimensi utama tanggapan pemerintah setempat

MANFAAT TANGGAP EPIDEMI OLEH PEMERINTAH SETEMPAT

Alasan pelibatan pemerintah setempat dalam tanggap COVID-19 didasarkan pada kelogisan desentralisasi pemerintah secara umum, yang menghasilkan keluaran dalam empat bidang: efisiensi, keadilan, penyediaan layanan, dan legitimasi.

Efisiensi, terutama efisiensi alokasi, terkait dengan fakta bahwa pemerintah setempat memiliki pemahaman lebih baik tentang kebutuhan setempat daripada pemerintah pusat. Dalam konteks krisis kesehatan dan epidemi, seperti COVID-19, ini memungkinkan pemerintah setempat untuk mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan setempat dengan cara yang

memaksimalkan dampaknya. Epidemi menimbulkan distorsi di pasar tenaga kerja dengan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang terlibat dalam tanggap epidemi dan mengurangi permintaan akan profesi lain. Pemerintah setempat akan lebih responsif terhadap perubahan di pasar tenaga kerja dan merealokasi sumber daya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekonomi setempat. Hal ini termasuk, misalnya, dukungan kepada usaha lokal yang terdampak oleh epidemi, yang tidak tercakup dalam program nasional atau pembiayaan pekerjaan umum padat karya terkait dengan tanggap epidemi. Kepemilikan setempat yang lebih kuat atas langkah-langkah tanggap ini juga menyiratkan pemantauan dan pemeliharaan yang lebih baik atas belanja pemerintah.

Keadilan tercapai karena pemerintah setempat berjalan di bawah pengawasan masyarakat yang lebih ketat daripada pemerintah pusat karena kedekatan mereka dengan penduduk. Hal ini mengarahkan ke pengelolaan investasi yang lebih efektif dan sumber daya keuangan lain untuk tanggap epidemi, terutama bagi kelompok penduduk terpinggirkan dan penduduk yang tinggal di tempat terpencil. Pengalaman epidemi sebelumnya (seperti Ebola) dan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan tertinggal merupakan salah satu kelompok yang terdampak paling serius. Pemerintah setempat memiliki kemungkinan lebih besar daripada pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah tanggap epidemi, seperti penyediaan air bersih dan layanan sanitasi yang lebih baik bagi daerah kumuh atau alat pelindung diri kepada pedagang kaki lima, pemulung sampah, dan pekerja sektor informal lainnya.

Penyediaan layanan oleh pemerintah setempat menggunakan manfaat informasi yang sama dan pengetahuan lokal yang membantu mereka mencapai efisiensi dan keadilan yang lebih baik. Pemerintah setempat tidak hanya memiliki pemahaman lebih baik tentang jenis layanan dan lingkup yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok penduduk, tetapi mereka juga dapat mengandalkan sumber daya dan keahlian lokal untuk memberikan layanan dan pemeliharaan tersebut. Hal ini sangat relevan dalam tanggap epidemi saat sumber daya mungkin sangat terbatas. Pemerintah pusat dapat mengidentifikasi bahan lokal yang murah dan solusi ad hoc untuk alat pelindung, fasilitas karantina, dan langkah-langkah lain, dan memobilisasi tenaga kerja lokal dengan upah yang tidak tinggi dan sukarelawan untuk tanggap epidemi.

Legitimasi pemerintah adalah fondasi kontrak sosial yang memastikan kohesi dan stabilitas sosial. Epidemi, terutama yang berlangsung cukup lama, menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi yang merusak fondasi ini. Penting bahwa dalam situasi tersebut, penduduk tetap percaya kepada pemerintah dan yakin akan ketepatan langkah-langkah tanggapan. Solidaritas sosial dan kepatuhan pada hukum adalah faktor pendukung utama untuk tanggap epidemi yang efektif, dan pemerintah setempat adalah lapisan terbawah tempat seluruh fondasi legitimasi pemerintah dibangun.

APA YANG BISA DILAKUKAN?

Tanggap epidemi oleh pemerintah setempat dapat mencakup enam bidang besar: meningkatkan kapasitas sistem kesehatan lokal, kesadaran dan mobilisasi masyarakat, meningkatkan langkah-langkah perlindungan sosial, menegakkan ketertiban umum dan peraturan untuk mencegah

dan mengendalikan penularan, keberlanjutan penyediaan layanan penting, dan langkah-langkah pemulihan ekonomi lokal. Lingkup tanggapan dan tindakan spesifik tergantung pada kompetensi dan tanggung jawab pemerintah setempat dan posisi fiskal mereka yang menentukan jumlah sumber daya finansial yang tersedia.

Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan lokal mungkin menjadi perhatian utama pemerintah setempat. Tekanan pada sistem kesehatan lokal saat epidemi meningkat berkali-kali lipat, tetapi sisa kapasitas biasanya sangat terbatas atau tidak ada. Pemerintah setempat dapat menugaskan tenaga medis tambahan untuk meningkatkan kapasitas yang ada (misalnya, pensiunan atau mahasiswa fakultas kedokteran). Pemerintah setempat dapat mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk fasilitas kesehatan, lembaga pemerintah dan swasta, dan masyarakat umum – termasuk perolehan alat pelindung diri dan sumber daya alat tes yang aman oleh vendor pihak ketiga untuk pelindung pernapasan dan peralatan lain, seperti perlengkapan pengendalian penularan, termometer digital, dan peralatan lain yang terkait dengan karantina dan isolasi. Pemerintah setempat dapat mengubah tempat yang ada dan membangun fasilitas baru untuk kegiatan yang terkait dengan isolasi/karantina dan laboratorium uji, menyediakan transportasi dan tempat tinggal bagi tenaga medis dan layanan menyeluruh seperti layanan/bantuan kesehatan perilaku.

Meskipun sistem kesehatan lokal adalah target upaya ini, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan membutuhkan tanggapan seluruh sektor dan tindakan terpadu oleh banyak sektor dan industri (layanan umum, pendidikan, transportasi, konstruksi) serta banyak pelaku pemerintah dan swasta.

Kesadaran dan mobilisasi masyarakat berperan penting untuk tanggapan epidemi yang efektif karena dua alasan:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit, langkah pencegahan, dan tingkat serta lingkup karantina wilayah/penutupan akses membantu mengendalikan epidemi sekaligus mengurangi tekanan pada sistem kesehatan lokal.
- Inisiatif dan kontribusi masyarakat melalui aksi sukarela, pengabdian masyarakat, sumbangan dana, dan sumbangan makanan dan nonmakanan melengkapi sumber daya pemerintah yang ada dan memelihara solidaritas dan kohesi sosial pada masa sulit.

Pemerintah setempat melakukan penjangkauan masyarakat termasuk memasang iklan di media, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, mencetak materi publikasi, melakukan kampanye via ponsel, memperbarui informasi web, membentuk pusat panggilan lokal untuk memberi informasi, dan menerjemahkan berbagai materi ke bahasa yang relevan.

Langkah-langkah perlindungan sosial menjadi penting untuk mencegah dampak tidak proporsional dari epidemi terhadap penduduk paling rentan, seperti kelompok lansia atau anak, kelompok disabilitas, orang dengan HIV, kelompok miskin dan tidak bekerja, penduduk di daerah kumuh, dan pekerja informal. Pemerintah setempat diketahui membuat sistem pengantaran makanan dan nonmakanan (terutama obat) bagi kelompok lansia dan disabilitas yang paling rentan dan mobilitasnya terbatas untuk membantu mereka mematuhi peraturan karantina

wilayah/penutupan akses. Pemerintah setempat bekerja melalui kemitraan dengan industri kelontong, apotek setempat, lembaga ketahanan dan darurat lokal, dan kelompok sukarelawan untuk memastikan bahwa barang-barang pokok dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa pemerintah setempat telah menerapkan slot waktu (misalnya pagi hari) saat toko-toko hanya melayani konsumen lansia

Banyak pemerintah setempat mengalokasikan sumber daya kepada penyedia akomodasi yang aman bagi korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga serta anak-anak mereka. Pemerintah setempat lain menerapkan larangan melakukan pengusiran dari akomodasi umum atau yang disewa secara pribadi, penangguhan pembayaran sewa, dan memberlakukan perlindungan tambahan bagi para penyewa untuk meminimalkan kerugian mereka. Kebijakan tidak melakukan pemutusan diterapkan untuk mencegah pemutusan layanan umum, seperti listrik dan air, terutama bagi masyarakat rentan. Pemerintah setempat mengizinkan penggunaan darurat atas fasilitas umum untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.

Membantu masyarakat miskin, menganggur, dan orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan adalah langkah penting lain yang dilakukan pemerintah setempat dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan skema jaminan sosial. Tindakan spesifik termasuk langkah penggantian penghasilan, seperti bantuan tunai bagi rumah tangga miskin dan sangat miskin dan kelompok pekerja rentan, seperti pemulung sampah. Pemerintah setempat membangun, memperbanyak, dan menjalankan bank makanan dan nonmakanan, pusat makanan, dan titik distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan dan tertinggal. Bukan hanya masyarakat miskin dan pekerja informal yang mendapat manfaat: dengan memungkinkan pekerja rentan melakukan penjarakan sosial, kurva epidemi akan memiliki peluang lebih besar untuk diratakan, bermanfaat bagi tiap orang dengan memperlambat penyebaran virus dan memungkinkan sistem kesehatan melakukan penanganan dengan lebih baik.

Penegakan ketertiban umum dan peraturan untuk mengendalikan epidemi terkait erat dengan tindakan kesadaran dan mobilisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kepatuhan sukarela pada pembatasan yang tak terhindarkan pada waktu epidemi adalah langkah penegakan terbaik. Kepatuhan tersebut berdasarkan pada kesadaran penuh tentang cara penularan, risiko penularan, efektivitas langkah pencegahan, dan seterusnya. Pemerintah setempat memiliki posisi unik untuk melacak pelaksanaan oleh perorangan, apartemen, rumah, masyarakat, organisasi, dan fasilitas umum. Pemerintah setempat dapat melacak dengan melakukan pemeriksaan rutin, inspeksi, sistem pencatatan dan pelacakan elektronik. Peran pemerintah setempat dalam menjaga barang-barang penting seperti makanan dan pasokan melalui pengaturan terorganisasi yang dikendalikan pemerintah juga penting. Hal ini melibatkan pengaturan jam buka toko kelontong, apotek, dan pemasok relevan lainnya sekaligus memastikan kepatuhan mereka pada langkah-langkah pencegahan, seperti penjarakan sosial. Pemerintah setempat dapat menerapkan pengendalian harga untuk mencegah kenaikan harga makanan dan bahan-bahan pokok lainnya dan menjaga agar sembako tetap terjangkau.

Keberlanjutan penyediaan layanan penting adalah tanggung jawab utama pemerintah setempat. Menyediakan aliran air bersih tanpa gangguan, layanan air kotor, pengambilan sampah, dan fasilitas umum adalah prioritas utama. Permintaan akan layanan tersebut bahkan dapat meningkat dalam keadaan darurat karena layanan tersebut dibutuhkan khususnya di daerah rentan (misalnya, pembangunan titik air baru). Di sisi lain, permintaan akan beberapa layanan umum seperti pendidikan dan kebudayaan dapat berkurang karena kondisi karantina wilayah/penutupan akses, sedangkan layanan lain dapat dikurangi (misalnya perbaikan jalan dan trotoar dapat dibatasi hanya pada perbaikan darurat). Hal ini mengharuskan pemerintah setempat mengevaluasi, mengatur ulang, atau menyesuaikan pengaturan layanan dan merealokasi sumber daya. Contohnya, fasilitas pemerintah setempat (misalnya pasar makanan) dapat disesuaikan agar penjarakan sosial dapat dilakukan dan untuk meminimalkan kontak fisik. Pemerintah setempat dapat menerapkan atau memperluas platform daring atau via ponsel untuk pembayaran tagihan dan penyediaan beberapa layanan lain.

Penyediaan layanan penting tanpa gangguan – air bersih, air kotor, pengambilan sampah, dan fasilitas lainnya – adalah tanggung jawab utama pemerintah.

Langkah bantuan untuk ekonomi lokal dirancang untuk mengurangi dampak ekonomi epidemi, terutama pada sektor-sektor yang mungkin akan terdampak paling serius – termasuk transportasi, pariwisata, dan hotel – dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah epidemi berakhir. Di banyak negara, pemerintah setempat diberi peran penting dalam membantu ekonomi lokal yang dinamis dan mendorong perkembangan ekonomi lokal. Saat restoran, lokasi wisata, dan tempat-tempat serupa menurun aktivitasnya atau tutup, hal ini berdampak pada orang-orang yang mengandalkan pekerjaan ini untuk penghasilannya. Terakhir, langkah pemulihan apa pun untuk ekonomi lokal yang menimbulkan hilangnya penerimaan pemerintah setempat dengan cepat harus diseimbangkan dengan biaya kesempatan menggunakan dana tersebut untuk membiayai tanggap COVID-19. Perusahaan yang mampu terus berjalan, atau bahkan berkembang, melewati krisis COVID-19 harus membayar pajak dan biaya mereka.

Opsi lokal yang dapat membantu usaha kecil yang paling mungkin akan terdampak oleh gangguan ini termasuk, misalnya, penangguhan pembayaran pajak dan nonpajak dan biaya lain untuk usaha lokal. Beberapa pemerintah setempat menjajaki cara-cara potensial untuk memberikan bantuan keuangan kepada penduduk dan usaha lokal, termasuk (namun tak terbatas pada) menangguhkan pajak usaha dan penghasilan lokal tertentu, menghentikan penutupan fasilitas dan membebaskan denda keterlambatan, membuat tempat parkir sementara di badan jalan untuk jangka pendek untuk layanan bungkus makanan restoran, dan menyediakan uang saku bagi karyawan untuk membeli makanan dan minuman dari restoran lokal. Langkah-langkah lokal termasuk juga penangguhan pembayaran sewa jika ada fakta pendukung tertentu – misalnya, jika fasilitas yang berada di lokasi usaha pemilik tempat ditutup karena keadaan darurat. Pemerintah setempat melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi tentang pencegahan dan pengendalian epidemi dan saran tentang cara menyesuaikan model dan proses bisnis sampai kepada UKM, termasuk melalui informasi via badan UKM/usaha dan asosiasi UKM.

Pengelolaan pekerja migran dalam jumlah besar harus diantisipasi. Di Laos, 700.000 pekerja migran pulang dari negara-negara tetangga karena COVID-19, dan pemerintah setempat diminta untuk mengelola integrasi mereka. Fenomena ini dapat terjadi di tempat lain saat pekerja migran dalam jumlah besar kembali ke negara asal mereka karena berhentinya ekonomi di negara tempat mereka bekerja. Menanggapi hal ini, Pemerintah Laos telah mendirikan tujuh pusat karantina, yang terletak di dalam provinsi yang memiliki titik perbatasan resmi. Dalam sistem tersebut, pemerintah setempat akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pusat ini berfungsi dan menyediakan layanan memadai agar pekerja yang kembali ke negara asalnya tetap berada dalam karantina sebelum pulang ke rumah masing-masing. Sangat penting untuk menyesuaikan formula transfer dari pemerintah tingkat lain agar mencakup pendanaan yang memadai untuk mandat baru ini.

MEMBIAYAI LANGKAH-LANGKAH TANGGAPAN TERTENTU

Tabel di bawah ini menunjukkan jenis pembiayaan yang tepat (dalam urutan signifikansi) untuk langkah-langkah tanggapan utama oleh pemerintah setempat. Keterterapan berbagai jenis pembiayaan tergantung pada sifat intervensi tertentu, tetapi prinsip umumnya adalah mengandalkan pembiayaan eksternal terlebih dahulu (filantropis atau swasta) diikuti dengan hibah bersyarat, lalu hibah diskresioner, dan terakhir, pendapatan asli daerah. Tujuannya adalah menghemat keuangan pemerintah yang paling fleksibel (hibah diskresioner dan pendapatan asli daerah) murni demi kebaikan masyarakat yang tidak terduga dalam pengaturan anggaran lain mana pun atau yang terlalu mendesak untuk menunggu alokasi bersyarat tertentu. Tabel ini menunjukkan relevansi DHBO untuk didistribusikan di seluruh spektrum kegiatan dan untuk mengisi kesenjangan pembiayaan yang relevan. Tabel ini juga mengilustrasikan alokasi DHBO yang tidak akan memenuhi syarat. Rancangan spesifik sistem DHBO akan beragam dari satu kasus ke kasus lainnya.

Bidang dan langkah tanggap epidemi	Pembiayaan
Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan lokal	
● Mempekerjakan tenaga medis tambahan	Hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, DHBO untuk peralatan ringan dan pegawai sementara
● Pengadaan peralatan medis, APD	
● Menyesuaikan fasilitas yang ada/membangun fasilitas baru	Hibah sektor, hibah pekerjaan umum, hibah diskresioner
● Penyediaan transportasi untuk tenaga medis	Hibah sektor untuk belanja berulang, DHBO
Kesadaran dan mobilisasi masyarakat	
● Produksi dan penyebaran materi informasi dan kesadaran secara daring dan luring	Hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, DHBO
● Membentuk pusat panggilan lokal untuk memberikan informasi dan mekanisme lain untuk mobilisasi masyarakat	Hibah diskresioner untuk belanja berulang, DHBO
Langkah-langkah perlindungan sosial	
● Membangun dan menjalankan sistem pengiriman makanan dan nonmakanan (terutama obat) bagi kelompok lansia dan disabilitas	Dana filantropis, hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, pendapatan asli daerah, DHBO
● Bantuan kepada penyedia akomodasi yang aman bagi korban kekerasan seksual/kekerasan dalam rumah tangga serta anak-anak mereka	
● Membentuk dan menjalankan pusat makanan dan titik distribusi	
● Menyesuaikan fasilitas umum untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi tuna wisma dan penduduk rentan lain	
● Kupon makanan untuk keluarga miskin (jika tidak disediakan terpusat)	
Penegakan ketertiban umum dan peraturan	
● Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan menerapkan sistem pencatatan dan pelacakan elektronik	Hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, DHBO
Keberlanjutan penyediaan layanan penting	
● Mengatur ulang/menyesuaikan pengaturan layanan (staf tambahan dan langkah perlindungan)	Hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, pendapatan asli daerah, DHBO
● Memperluas/menyesuaikan fasilitas penyediaan layanan	Hibah modal bersyarat atau diskresioner, DHBO
Langkah-langkah pemulihan untuk ekonomi lokal	
● Menyesuaikan ruang publik untuk memfasilitasi berjalannya usaha	Hibah diskresioner, pendapatan asli daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha, DHBO
● Keberlanjutan penyediaan layanan fasilitas bagi usaha lokal (tergantung pada modalitas penyediaan)	Hibah bersyarat untuk belanja berulang, pendapatan asli daerah, DHBO
● Produksi dan penyebaran informasi dan saran bagi UKM tentang penyesuaian proses usaha	Pendapatan asli daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha, DHBO
Mengelola pekerja migran dalam jumlah besar	
● Membangun pusat karantina	Hibah modal bersyarat (penting untuk tidak mengalihkan sumber daya diskresioner untuk tugas ini yang dilakukan atas nama pemerintah pusat
● Menugaskan staf dan mengelola pusat karantina	Hibah bersyarat untuk belanja berulang (penting untuk tidak mengalihkan sumber daya diskresioner untuk tugas ini yang dilakukan atas nama pemerintah pusat)
● Memantau karantina di tempat tinggal pekerja migran yang mudik	Hibah bersyarat atau diskresioner untuk belanja berulang, DHBO dapat ditambahkan ke program pemantauan yang ada

Menu (uraian singkat)	Uraian panjang	Kategori dampak
1. Pencegahan		
Pelatihan Acara	Pelatihan/informasi kepada masyarakat tentang pandemi seperti COVID	Informasi Umum
Pelatihan pengelolaan darurat	Pelatihan administrasi dan sektor pelayanan publik	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Unit koordinasi darurat (UKD)	Pendirian kantor koordinasi administrasi publik	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pemeliharaan koordinasi darurat	Pemeliharaan fasilitas	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Kampanye Media	Publikasi melalui cetakan dan surat kabar	Informasi Umum
Pertemuan Sosialisasi	Pengembangan kapasitas - higiene (WASH)	Informasi Umum
Radio Masyarakat	Pengumuman/panduan kesehatan masyarakat	Informasi Umum
Kartu Informasi	Panduan Rumah Tangga	Informasi Umum
Cairan Pembersih Tangan	Rumah Tangga/Pasar/Administrasi/PKU	Alat Pelindung Diri
Persediaan APD	Rumah Tangga/Pasar/Administrasi/PKU	Alat Pelindung Diri
Pemetaan Rumah Tangga	Survei Administrasi	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Alat uji Pusat Kesehatan Utama	Alat uji dasar	Persediaan medis dan persediaan penting lainnya
Pusat Kesehatan Utama - pelatihan staf	Pelatihan untuk staf PKU (pengujian/ perawatan/perlindungan)	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pusat Kesehatan Utama - persediaan pokok	Alat uji dan obat-obatan	Persediaan medis dan persediaan penting lainnya
Pusat Kesehatan Utama - Aksesibilitas	Ketersediaan staf (top-up gaji)	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pusat Kesehatan Utama - Air	Air bersih/air dalam kemasan	Persediaan medis dan persediaan penting lainnya
Higiene Masyarakat	Disinfeksi fasilitas umum yang memenuhi syarat	Disinfeksi dan pembersihan
Transportasi Masyarakat	Disinfeksi transportasi umum yang memenuhi syarat (termasuk sektor swasta)	Disinfeksi dan pembersihan
Higiene Masyarakat	Disinfeksi fasilitas swasta yang memenuhi syarat	Disinfeksi dan pembersihan
2. Tanggap Cepat		
Mobilisasi PKU	Pelayanan penjangkauan disediakan	Perawatan/Pengendalian
Perawatan medis yang tidak dapat ditunda	Penyediaan pelayanan medis gratis melalui PKU	Perawatan/Pengendalian
Rujukan	Tidak ada biaya rujukan ke rumah sakit, termasuk untuk transportasi	Perawatan/Pengendalian
Uji Lonjakan (Surge Testing)	Uji lonjakan (surge testing) untuk melindungi masyarakat	Perawatan/Pengendalian
Analisis fasilitas medis sementara	Survei dan analisis tempat tidur dan persediaan yang tersedia di PKU	Perawatan/Pengendalian
Fasilitas medis sementara	Pembangunan fasilitas sementara termasuk perubahan penggunaan aset daerah	Perawatan/Pengendalian

Menu (uraian singkat)	Uraian panjang	Kategori dampak
Pendirian pusat karantina	Pendirian pusat-pusat karantina termasuk penggunaan hotel/infrastruktur wisata	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Alat medis spesialis	Pengadaan alat medis spesialis	Perawatan/Pengendalian
Pembuangan limbah medis	Pembangunan/pemeliharaan/penggunaan sistem	Perawatan/Pengendalian
Transportasi medis darurat	Transportasi untuk masyarakat ke dan dari PKU dan rumah sakit rujukan	Perawatan/Pengendalian
Persediaan makanan dan air	Penyediaan makanan dan air	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pasokan energi rumah tangga	Bahan bakar untuk memasak dan memanaskan	Persediaan medis dan persediaan penting lainnya
Solusi digital akses pasar	Pembentukan sistem pemesanan daring untuk pasar umum	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pengendalian harga pasar	Pemantauan dan pemeriksaan biaya dan kualitas makanan pokok	Informasi Umum
Fasilitas penyimpanan darurat	Penyimpanan strategis untuk barang-barang penting termasuk makanan dan energi (termasuk penyimpanan dingin)	Persediaan medis dan persediaan penting lainnya
Perlindungan - kebijakan diam di rumah	Kesadaran masyarakat akan pelaksanaan diam di rumah	Informasi Umum
Pemantauan dan pelaporan situasi	UKD pengelolaan umum	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Program APD Masyarakat	APD untuk anggota masyarakat (masker/ cairan pembersih tangan)	Alat Pelindung Diri
Biaya keamanan tambahan	Biaya keamanan tambahan	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pengelolaan dan pengendalian batas wilayah	Fasilitas dan pelayanan tambahan batas internasional	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pemantauan lokasi bisnis	Keamanan tambahan untuk para peritel dan pusat-pusat perbelanjaan	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pelacakan masyarakat	Pelayanan pelacakan digital	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Pelayanan masyarakat	Fasilitas pembayaran untuk tunai/voucher	Pelaksanaan dan pemberlakuan jaga jarak
Biaya gaji pelayanan masyarakat tambahan	Pembayaran untuk para penolong pertama/first responder dan staf penting (kerja lembur dan tambahan)	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pelayanan bantuan psikologis warga	Bantuan psikologis untuk mengurangi kekerasan berbasis gender	Perawatan/Pengendalian
Pencarian dan pertolongan	Perawatan untuk penduduk lansia dan rentan	Perawatan/Pengendalian
3. Pemulihan		
Hibah untuk usaha kecil	Hibah untuk usaha kecil untuk menanggung gaji dan pemeliharaan kapasitas produksi	Pemulihan ekonomi
Bekerja sementara	Pekerjaan sementara untuk menyediakan dana bagi rumah tangga untuk pekerjaan umum	Pemulihan ekonomi
Perlindungan Sosial	Pembayaran Hibah yang Disempurnakan untuk Ibu & Anak Usia Dini	Perlindungan Sosial Rumah Tangga

Menu (uraian singkat)	Uraian panjang	Kategori dampak
Perlindungan Sosial	Makanan sekolah	Perlindungan Sosial Rumah Tangga
Perlindungan Sosial	Pemberian bantuan pesangon kepada UKM	Perlindungan Sosial Karyawan
Perlindungan Sosial	Pembayaran dana disabilitas yang disempurnakan	Perlindungan Sosial Rumah Tangga
Perlindungan Sosial	Pembayaran bantuan pertanian	Perlindungan Sosial Karyawan
Perlindungan Sosial	Hibah langsung untuk kelompok rentan	Perlindungan Sosial Rumah Tangga
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Perubahan penggunaan aset	Membangun kembali ruang fiskal lokal
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pembentukan unit pengembangan bisnis dan kawasan industri daerah	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pembentukan dana perusahaan rintisan UMKM daerah dan bantuan untuk usaha yang sedang bertumbuh (hibah)	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Desain dan pelaksanaan skema jaminan dengan lembaga keuangan domestik (bank umum, bank pembangunan nasional, dana negara)	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pengembangan rencana dan anggaran pemulihan ekonomi	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pengembangan rencana dan anggaran pemulihan ruang fiskal lokal	Pengelolaan dan pelaksanaan yang efisien
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Mobilisasi penerimaan termasuk dari sumber-sumber baru, seperti pajak atas pelayanan digital	Membangun ruang fiskal lokal
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Kredit pajak untuk perusahaan dan usaha lokal	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Bantuan pendaftaran tanah/izin penggunaan lahan	Membangun ruang fiskal lokal
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Sewa pemerintah kota dan setempat	Membangun ruang fiskal lokal
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Strategi pengembangan ekonomi lokal	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pinjaman dan jaminan stabilisasi langsung kepada UKM yang membutuhkan bantuan neraca (membutuhkan persetujuan dari Platform Investasi UNCDF)	Pemulihan ekonomi
Pemulihan Ekonomi - & Pembangunan Kembali Ruang Fiskal Lokal	Pembentukan dana perusahaan rintisan UMKM daerah dan bantuan untuk usaha yang sedang bertumbuh (pinjaman dan jaminan langsung) (membutuhkan persetujuan dari Platform Investasi UNCDF)	Pemulihan ekonomi

Hibah daerah - waktu penyelesaian proses 14 hari

Unlocking Public and Private Finance for the Poor

Jadwal	Pemerintah setempat	UNCDF / Mitra
Hari 1	1	**Notifikasi elektronik** Komunikasi langsung dengan setiap/jaringan kota dan daerah mengenai protokol tanggapan pemerintah setempat dan permintaan bantuan.
	Proposal Penyusunan dan penyerahan permohonan / proposal	2 — Hari 1-7
Hari 8-9	3	**Evaluasi elektronik** Evaluasi permohonan / proposal dengan menggunakan kunci ganda (kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah serta kapabilitas tanggapan) dan pemilihan awal pemohon.
Hari 10-11	4	**Pemilihan elektronik** Mematangkan pemilihan permohonan / proposal, dan pemberitahuan tentang pemerintah setempat terpilih, dan penyerahan kontrak.
	Penentuan proposal terpilih Persetujuan atas seluruh syarat dan ketentuan, tanda tangan kontrak dan penyerahan kembali ke UNCDF	5 — Hari 11-12
Hari 13	6	**Kontrak elektronik** Membaca dan turut menandatangani kontrak hibah, dan pengaturan vendor di PeopleSoft ERP.
Hari 14	7	**Pengaturan hibah elektronik** Menerapkan pemantauan kinerja bersama dan pemicu pembayaran melalui PeopleSoft ERP.
	Pelaksanaan Pelaksanaan operasional kegiatan tanggapan COVID-19 oleh pemerintah setempat	8 — Hari 15-16
Hari 17 sampai akhir kontrak	9	**Pemantauan dan pembayaran elektronik** Mentransfer tahapan pembiayaan secara berurutan berdasarkan usulan rencana kerja dan pemantauan kemajuan.

Alat bantu elektronik untuk mengelola proses hibah

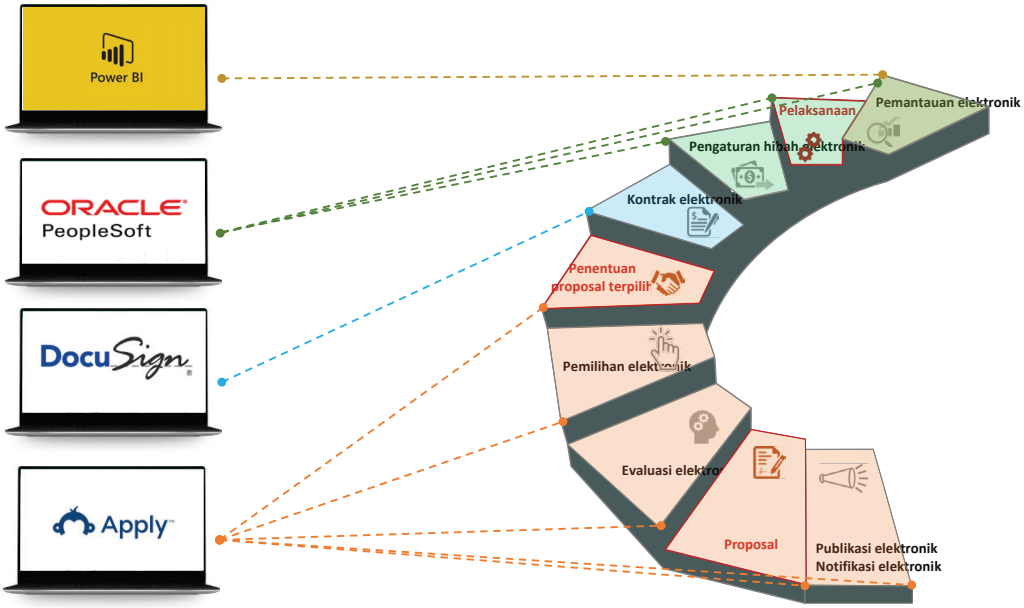

United Nations Capital Development Fund (UNCDF) membuat pembiayaan pemerintah dan swasta berfungsi bagi masyarakat miskin di 47 negara kurang berkembang di dunia. Dengan mandat utama dan instrumennya, UNCDF menawarkan model pembiayaan "upaya terakhir (last mile)" yang membuka sumber daya pemerintah dan swasta, terutama di tingkat rumah tangga, untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Model pembiayaan UNCDF berjalan melalui tiga saluran: ekonomi digital inklusif, menghubungkan orang perorangan, rumah tangga, dan usaha kecil dengan ekosistem keuangan yang menginisiasi partisipasi dalam ekonomi lokal, dan memberikan alat bantu untuk keluar dari kemiskinan dan mengelola aspek keuangan; pembiayaan pembangunan daerah yang memberi kemampuan kepada daerah melalui desentralisasi fiskal, pembiayaan kota inovatif, dan pembiayaan proyek terstruktur untuk menggerakkan pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan; dan pembiayaan investasi, yang memberikan struktur pembiayaan katalistik, pemutusan hubungan usaha dengan klien dalam kategori tertentu untuk menghindari risiko, dan penyebaran modal untuk mendorong dampak SDG dan mobilisasi sumber daya dalam negeri. Dengan memperkuat cara kerja pembiayaan bagi masyarakat miskin di tingkat rumah tangga, usaha kecil, dan infrastruktur lokal, UNCDF berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Global-SDG 1, yaitu memberantas kemiskinan, dan SDG 17 tentang sarana pelaksanaan. Dengan mengidentifikasi segmen pasar tersebut, tempat model pembiayaan inovatif dapat memiliki dampak transformatif dalam membantu untuk mencapai upaya terakhir dan mengatasi eksklusi dan ketidaksetaraan akses, UNCDF berkontribusi pada keragaman SDG yang luas.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan tim Pembiayaan Pembangunan Daerah dalam keuangan pemerintah setempat:
https://www.uncdf.org/local-development-finance

UNCDF

Unlocking Public and Private Finance for the Poor